

Implementasi Kurikulum Merdeka Tingkat Sekolah Dasar di Papua

Roberto W. Marpaung

Universitas Musamus

Korespondensi penulis: *roberto_fkip@unmus.ac.id

Abstract: *The background to this research is the perception of a number of teachers and education practitioners who indicate that implementing the independent curriculum in Papua is very difficult and it is not yet the time to do it. Implementation of the Independent Curriculum began after the Covid-19 Pandemic in Indonesia. This research was carried out with the aim of describing the implementation of the Merdeka Curriculum at the elementary school level in the Papua Mountain Province. The results of this research become material for formulating policies by the government, become a reference source for other researchers, and become general knowledge for the public, especially those involved in the world of basic education. The research was carried out using a case study method with a qualitative approach. Research data was collected using data collection techniques consisting of observation, interviews and questionnaires. Supervisors, Principals and Elementary School Teachers in four districts were the research subjects. The research subjects were determined using purposive sampling techniques. The research results show that there are three options for implementing the primary school level curriculum, including: 1) Independent learning curriculum, 2) Free sharing curriculum, and 3) Independent independent curriculum. Most schools still implement the independent learning curriculum option. Even though three options are given, curriculum implementation at the educational unit level still seems rigid and not independent. Therefore, the central government, through provincial and district education offices must work together to ensure the implementation of the curriculum in accordance with the targets or standards set by the government.*

Keywords: *Curriculum Implementation, Independent Curriculum, Elementary School, Papua*

Abstrak: Yang menjadi latarbelakang penelitian ini adalah persepsi sejumlah guru dan praktisi pendidikan yang mengindikasikan bahwa penerapan kurikulum merdeka di Papua sangat sulit dan belum saatnya untuk dilakukan. Implementasi Kurikulum Merdeka mulai dilaksanakan pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini terlaksana dengan tujuan menggambarkan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar di Provinsi Papua Pegunungan. Hasil dari penelitian ini menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan oleh pemerintah, menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain, dan menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat khususnya yang berkecukupan di dunia pendidikan dasar. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket. Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru Sekolah Dasar di empat Kabupaten menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian tersebut ditentukan dengan menggunakan tehnik pengambilan sampel secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga opsi implementasi kurikulum tingkat sekolah dasar antara lain; 1) Kurikulum merdeka belajar, 2) Kurikulum merdeka berbagi, dan 3) Kurikulum merdeka mandiri. Sebagian besar sekolah masih menerapkan opsi kurikulum merdeka belajar. Walaupun diberikan tiga opsi, implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan masih terkesan kaku dan tidak merdeka. Oleh karena itu, pemerintah pusat, melalui dinas pendidikan provinsi dan kabupaten harus bersinergi memastikan implementasi kurikulum yang sesuai dengan target atau standar yang ditetapkan pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi Kurikulum, Kurikulum Merdeka, Sekolah Dasar, Papua

LATAR BELAKANG

Desas desus hingga realitas tentang ketertinggalan kualitas layanan pendidikan di daerah Papua seringkali diperbincangkan baik secara lokal, nasional, dan bahkan internasional. Salah satu media terkemuka di Indonesia merilis bahwa terdapat 600 ribu anak tidak sekolah di Papua (Sucahyo, 2023). Selanjutnya terdapat permasalahan serius di pedalaman diantaranya akses sulit, fasilitas yang tidak memadai, dan angka kemiskinan yang masih tinggi (Suwandi

& Hartik, 2022). Berbagai rupa permasalahan pendidikan di daratan Papua sangat kompleks dan dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka digadang-gadang merupakan langkah serius pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Salah satu yang menjadi elemen inti dari program tersebut adalah IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka). Implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mampu meningkatkan keterampilan komunikasi, kreativitas, berpikir kritis, dan peningkatan keterampilan kolaborasi siswa (Jufriadi, Huda, Aji, Pratiwi, & Ayu, 2022). Beberapa sekolah masih merancang formula yang tepat dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka implementasi Kurikulum Merdeka setelah dianalisis lebih baik dan sesuai dengan kultur pendidikan Indonesia daripada Kurikulum 2013 (Angga, Suryana, Nurwahidah, Hernawan, & Prihatini, 2022). Output dari implementasi kurikulum ini adalah pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, berkebinnekaan global, kreatif, inovatif, berkemampuan memecahkan masalah, dan berkolaborasi atau bersinergi.

Berbagai jurus terus dikeluarkan pemerintah untuk menjamin keberhasilan implementasi kurikulum di seluruh daerah Indonesia. Salah satu yang menjadi focus pemerintah adalah menumbuhkembangkan karakter yang berkesesuaian dengan Profil Pelajar Pancasila sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul demi terwujudnya Indonesia Maju yang ditargetkan di tahun 2045. Literasi juga menjadi salah satu sasaran program MBKM. Perubahan jaman yang begitu cepat dan berfluktuasi tinggi mengharuskan seluruh generasi muda menguasai literasi. Literasi digital memiliki peranan penting dalam menumbuhkembangkan karakter siswa di abad 21 (Aulia, Hafizholiza, Alfazriani, Wahyudin, & Caturiasari, 2023). Peningkatan dan pengembangan literasi ini akan menjadi trigger atau langkah awal untuk mengejar ketertinggalan-ketertinggalan di bidang pendidikan baik di daerah urban maupun di daerah pedesaan atau pedalaman.

Kurikulum Merdeka menuntut penyelenggaraan pendidikan yang berbasis hasil. Seluruh komunitas sekolah diberi kemerdekaan, berkreasi demi tercapainya target atau visi dan misi yang sudah ditentukan. Pendidikan berbasis hasil terdiri dari disain program, mapping program, pelaksanaan, asesmen mata kuliah, studi banding, rujukan untuk peningkatan mutu, hingga rekomendasi untuk merevisi CPL (Alawi, Sumpena, Supiana, & Zaqiah, 2022). Namun, dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka, masih terdapat berbagai kebingungan di kalangan praktisi pendidikan khususnya mereka yang bertugas di daerah-daerah terisolir, tertinggal, dan terluar Indonesia.

Provinsi Papua Pegunungan merupakan daerah otonomi baru di daratan Papua. Provinsi ini sebelumnya merupakan bagian otonomi Provinsi Papua. Kondisi sosial dan geografis yang kurang kondusif menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah Papua Pegunungan. Koneksi internet yang sering mengalami gangguan dianggap menjadi salah satu hambatan dalam penerapan kurikulum secara efektif. Selain itu, aksesibilitas ke sekolah-sekolah juga menjadi problem hingga saat ini terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi, sejumlah permasalahan yang menjadi penghambat implementasi kurikulum merdeka harus segera diatasi sehingga apa yang menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan dapat tercapai.

Diperlukan kajian-kajian seputar implementasi kurikulum khususnya di daerah-daerah tertinggal dan terluar. Penelitian menjadi titik awal suatu kebijakan di bidang pendidikan khususnya dalam hal penerapan kurikulum. Penelitian hadir sebagai indikator kualitas pendidikan dari suatu tahapan ke tahapan berikutnya. Para penyelenggara pendidikan, baik pemerintah ataupun swasta harus bisa merancang dan menyusun kebijakan yang berbasis riset sehingga kebijakan yang diambil tidak salah sasaran.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kurikulum Merdeka

Struktur kurikulum merdeka pada pendidikan dasar terdiri dari dua kegiatan utama yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (Kemendikbudristek 262, 2022). Aktivitas pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan tujuan memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Enam kemampuan fondasi awal perlu dipahami oleh siswa sekolah dasar. Keenam kemampuan tersebut antara lain; Kemampuan Fondasi 1 yaitu untuk mengenal nilai agama dan budi pekerti, Kemampuan fondasi 2 yaitu kemampuan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar, kemampuan fondasi 3 yaitu keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya, kemampuan fondasi 4 yaitu terkait dengan pemaknaan terhadap belajar yang positif, kemampuan fondasi 5 yaitu pengembangan keterampilan motoric dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri, dan kemampuan fondasi 6 yaitu kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja.

Kunci keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah dipegang oleh kepala sekolah, guru-guru yang memiliki pola pikir yang berbeda (Rahayu, Rosita, Rahayuningsih, & Hernawan, 2022). Pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menjadi salah satu model pembelajaran dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.

Komunitas Belajar

Komunitas belajar merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui kolaborasi. Komunitas belajar merupakan sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang secara bersama-sama belajar secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Optimalisasi komunitas belajar diadopsi dari teori *Professional Learning Community* (PLC) oleh Richard Defour.

Komunitas belajar menjadi tempat bagi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan secara rutin dan terprogram. Melalui komunitas belajar, pendidik dan tenaga kependidikan membahas masalah, hambatan, ataupun tantangan yang dihadapi murid dalam pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Terdapat tiga ide besar komunitas belajar dalam sekolah; 1) berfokus pada pembelajaran, 2) membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, berorientasi pada hasil (Pembelajaran Murid). Ketiga ide besar tersebut memastikan komunitas belajar berkontribusi pada pembelajaran berkualitas yang dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar murid.

Tahapan membentuk komunitas belajar dalam satuan pendidikan antara lain; 1) Membentuk tim kecil, 2) telaah data hasil belajar murid, 3) melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolah, membuat komitmen bersama, dan menyepakati tata nilai, 4) memasukkan jam efektif guru di sekolah, 5) merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru.

Aspek Komunitas Belajar (Hipp & Huffman, 2010)	Indikator	Hasil Pengamatan	
		Belum	Sudah
Kepemimpinan berbagi dan mendukung	Adanya tim kecil sebagai penggerak komunitas belajar		
Komitmen dan nilai bersama	Terdapat keyakinan bahwa komunitas belajar penting		

	Terdapat komitmen bersama dan nilai yang disepakati bersama		
	Komitmen dan nilai-nilai bersama diterapkan dalam proses belajar di komunitas belajar.		
Pembelajaran kolektif dan penerapannya	Percakapan diskusi berfokus pada pembelajaran murid		
	Berdiskusi memecahkan tantangan/masalah pembelajaran murid		
	Berdiskusi merencanakan pembelajaran murid bersama		
	Terdapat kolaborasi antar guru dalam komunitas belajar		
	Orientasi komunitas belajar berbasis data hasil belajar murid		
	Komunitas belajar dilaksanakan dalam siklus yang terdiri dari refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.		
Berbagi praktik	Melakukan observasi pembelajaran di kelas guru model.		
	Melakukan refleksi bersama		
Kondisi mendukung struktur	Mengalokasikan waktu belajar di komunitas belajar minimal 1 jam per minggu.		
	Terdapat jadwal dan topic diskusi komunitas belajar		
Kondisi mendukung relationship	Anggota komunitas belajar saling menghargai pendapat satu dan lainnya.		
	Anggota komunitas belajar saling mendengarkan dan menyimak dengan baik pendapat yang lainnya		
	Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya.		
	Setiap anggota berkontribusi secara aktif		
Terbangun lingkungan belajar yang ramah guru di komunitas belajar	Terdapat rasa saling membutuhkan antar anggota komunitas belajar.		

Tabel 1 Kriteria Komunitas Belajar dalam Sekolah

Komunitas belajar terhubung dengan P5 (Projek penguatan profil pelajar pancasila). P5 merupakan salah satu bagian dari Kurikulum Merdeka yang menuntut peserta didik menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. P5 menjadi salah satu proses implementasi kurikulum merdeka yang wajib untuk dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Selain itu, komunitas belajar juga menjadi salah satu bumbu sedap implementasi kurikulum merdeka. Tujuan dari komunitas belajar ini tak lain untuk meningkatkan sinergitas atau kolaborasi antara pengawas dan kepala sekolah serta guru-guru sehingga tercipta lingkungan belajar yang sehat dan berkualitas.

Implementasi Kurikulum Merdeka Tingkat Sekolah Dasar di Papua

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan sentral dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu tempat tertentu. Kurikulum dapat dipahami sebagai peraturan tertulis yang terdiri dari beberapa komponen tentang pelaksanaan pendidikan di suatu jenjang dan tempat. Saat ini, pemerintah terus berupaya untuk terus melakukan terobosan-terobosan baru demi terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terwujudnya pendidikan yang merata dari Sabang sampai Merauke.

Ambiguisitas para praktisi pendidikan akan kurikulum merupakan suatu fenomena yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sebab, seluruh pelaksana pendidikan baik itu pengawas, kepala sekolah ataupun guru harus memahami kurikulum dan implementasi kurikulum yang sedang diberlakukan pemerintah. Implementasi kurikulum merdeka mewajibkan seluruh warga komunitas pembelajaran memahami kurikulum dan implementasinya di satuan pendidikan masing-masing.

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang diberlakukan pemerintah pasca Pandemi Covid-19. Kurikulum Merdeka dirancang untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah (BSKAP, 2022).

Pemerintah berharap mampu mengejar ketertinggalan yang diakibatkan oleh *learning loss* yaitu dengan menghadapi era *new normal*. pasca Pandemi Covid-19. Kurikulum 2013, yang sebelumnya telah diterapkan, dianggap kaku dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Keinginan Bangsa Indonesia untuk mampu mengejar ketertinggalan dari Negara lain yaitu dengan cara berlari merupakan salah satu output dari penerapan atau pemberlakuan Kurikulum Merdeka.

Beberapa sekolah telah mencoba melakukan internalisasi muatan lokal dalam implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum kearifan lokal merupakan sebuah model

kurikulum yang mengelaborasi dan mengaktualisasikan seperangkat nilai-nilai luhur yang dianut atau telah menjadi belief sebuah masyarakat, yang disesuaikan dengan karakteristik tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya (Trisna, Wahyudin, Rusaman, Riyana, & Praghlapati, 2022).

Internalisasi muatan lokal kedalam implementasi kurikulum merdeka khususnya di tingkat sekolah dasar sangat penting mengingat karakteristik bangsa Indonesia sebagai Negara dengan bangsa yang beragam baik budaya, adat istiadat, ataupun tradisi. Internalisasi muatan dapat dilakukan dengan penajajakan potensi-potensi atau keunikan maupun karakteristik daerah tersebut. Selanjutnya dapat dilakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi dari sisi muatan lokal.

Salah satu hambatan dalam menerapkan kurikulum merdeka adalah kurangnya pemahaman guru akan kurikulum merdeka yang diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi atau pelatihan bagi para guru (Alimuddin, 2023). Fenomena ini menjadi lampu indikator pendidikan kita bahwa manajemen sumberdaya manusia di bidang pendidikan belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Seorang calon guru sudah sepatutnya paham dan peka terhadap perkembangan jaman dan penerapan kurikulum terbaru sebab sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan.

Ditambah lagi saat ini guru dituntut untuk mampu mendidik peserta menjadi manusia yang memiliki keterampilan berpikir kritis. Dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis anak Indonesia, disarankan menerapkan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik karna dapat secara efektif meningkatkan kemampuan berpikir anak-anak usia sekolah dasar (Daga, Wahyudin, & Susilana, 2022).

Problematika terkait dengan kurangnya capaian kompetensi professional dalam bidang kurikulum harus menjadi perhatian pemerintah sehingga implementasi kurikulum merdeka dapat dilakukan sesuai dengan rambu-rambu dan pedoman yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian atau badan non kementerian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sampel ditentukan dengan menggunakan tehnik pengambilan sampel secara purposif (*purposive sampling technique*). Tehnik pengambilan data ini diterapkan untuk mempertajam reliabilitas sampel sehingga data yang terkumpul lebih valid.

Sampel dari penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, pengawas, dan guru dari sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Kemudian tehnik pengambilan data yang

digunakan terdiri dari observasi, wawancara dan kuesioner. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan tehnik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosesnya meliputi persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang fokus pada pengembangan kemampuan mengidentifikasi warna dengan pendekatan eksperimen. Ini termasuk

Berbagai persoalan pendidikan terus diatasi dengan berbagai strategi dan berbagai cara. Pemerataan pendidikan masih menjadi salah satu masalah yang sangat krusial dan menjadi skala prioritas untuk diselesaikan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pendidikan adalah dengan meluncurkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang sering dikenal dengan singkatan MBKM. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk berbagai problematika pendidikan di tanah air.

Implementasi Kurikulum Merdeka menjadi komponen turunan dari program MBKM yang sudah diterapkan untuk memulihkan pembelajaran pasca Pandemi Covid-19. Implementasi kurikulum baru ini terus menuai pro dan kontra di tengah penyelenggara pendidikan. Pengetahuan guru yang minim akan kurikulum dan implementasi kurikulum menjadi persoalan baru pewujudan MBKM. Pemerintah melalui kementerian dan masyarakat harus lebih banyak melaksanakan pengembangan kompetensi bagi guru dan kepala sekolah khususnya terkait dengan kurikulum dan implementasi kurikulum merdeka atau kurikulum yang sedang diberlakukan sehingga program MBKM bisa terlaksana sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat.

Implementasi Kurikulum Merdeka tingkat sekolah dasar di Papua juga tidak terlepas dari persoalan. Pemerataan guru yang berkualitas masih menjadi salah satu penghambat implementasi kurikulum ini. Selain itu, gangguan jaringan internet yang kerap terjadi di daerah Papua Selatan dan Papua Pegunungan menjadi penghalang para guru dalam mengembangkan diri dan juga berkomunikasi dalam mengembangkan sinergitas dengan guru lain dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar di daerah otonomi baru Provinsi Papua Pegunungan mengalami berbagai persoalan dan mendapatkan berbagai hambatan. Pengetahuan guru tentang kurikulum dan kemampuan mereka dalam

mengimplementasikan kurikulum menjadi salah satu skala prioritas untuk segera diatasi. Ada tiga opsi implementasi kurikulum yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan; mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Samapi saat ini, sejumlah sekolah masih menggunakan opsi implementasi kurikulum mandiri belajar. Hanya ada 1 sekolah dasar yang sudah menerapkan opsi kurikulum mandiri berbagi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum merdeka tingkat sekolah dasar di Provinsi Papua Pegunungan masih dilakukan dengan opsi mandiri belajar.

DAFTAR REFERENSI

- Alawi, D., Sumpena, A., Supiana, & Zaqiah, Q. Y. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pasca Pandemi Covid-19. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5863-5873.
- Alimuddin, J. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar . *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL*, 67-75.
- Angga, Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihatini. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal BASICEDU*, 5877-5899.
- Aulia, F. N., Hafizholiza, N., Alfazriani, R. S., Wahyudin, D., & Caturiasari, J. (2023). Dampak Gerakan Literasi Terhadap Pengembangan Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar Indonesia*, 31-40.
- BSKAP. (2022). *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Daga, A. T., Wahyudin, D., & Susilana, R. (2022). An investigation of developing Indonesian elementary school students' critical thinking skills: A literature review. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 1752-1766.
- Jufriadi, A., Huda, C., Aji, S. D., Pratiwi, H. Y., & Ayu, H. D. (2022). Analisis Keterampilan Abad 21 melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 39-53.
- Keppmendikbudristek 262. (2022). *Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., & Hernawan, A. H. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak . *Jurnal BASICEDU*, 6313-6319.

- Sucahyo, N. (2023, 06 26). *Lebih 600 Ribu Anak Papua Tak Sekolah, Apa yang Salah?* Retrieved 10 12, 2023, from www.voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-600-ribu-anak-papua-tak-sekolah-apa-yang-salah-/7153107.html>
- Suwandi, D., & Hartik, A. (2022, 06 07). *Potret Pendidikan di Pedalaman Papua, Sekolah Sempat Tutup, Siswa Belajar Tanpa Seragam*. Retrieved 10 12, 2023, from www.kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2022/06/07/054500778/potret-pendidikan-di-pedalaman-papua-sekolah-sempat-tutup-siswa-belajar?page=all>
- Trisna, A. S., Wahyudin, D., Rusaman, Riyana, C., & Pragholapati, A. (2022). Kurikulum Kearifan Lokal Bali Berbasis Heutagogy di Sekolah Dasar. *Journal of Elementary School (JOES)*, 122-135.